

# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA PANGKALPINANG**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2023 dapat selesai seperti yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja) ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

**Pangkalpinang, 24 Agustus 2023**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**  
**KOTA PANGKALPINANG**



**M. AGUS SALIM, S.T.**  
**PEMBINA TINGKAT I / IV b**  
**NIP. 197407162005011008**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA P) tahun 2023
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja

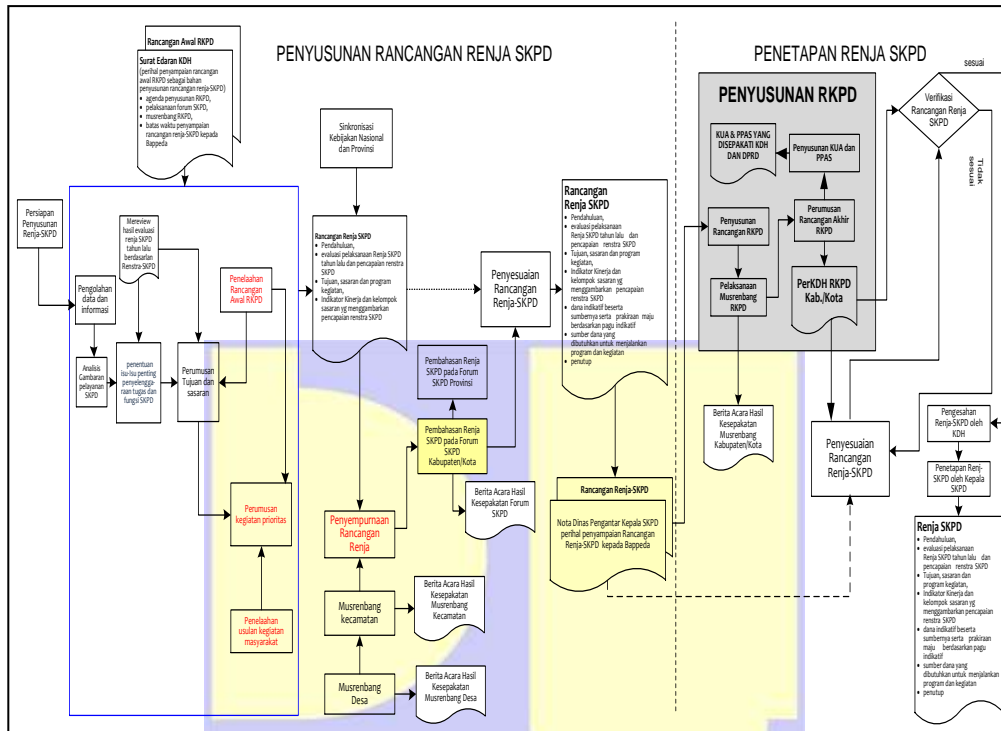
Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPJMD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2018-2023.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

16. Nomor 517);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
17. Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);  
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 19).



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS Perubahan) Tahun 2023.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, meliputi :

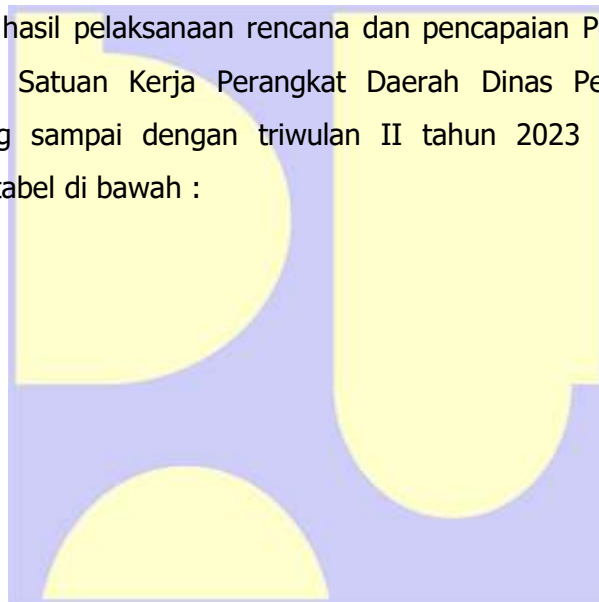
- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | Pendahuluan  |
|         | Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan   |
| BAB II  | Evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD sampai dengan triwulan II tahun 2023  |
|         | Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap RKPD Perubahan tahun 2023, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. |
| BAB III | Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan   |
|         | Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan   |
| BAB IV  | Rencana Kerja dan Pendanaan  |
|         | Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan OPD  |
| BAB V   | Penutup  |

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU**

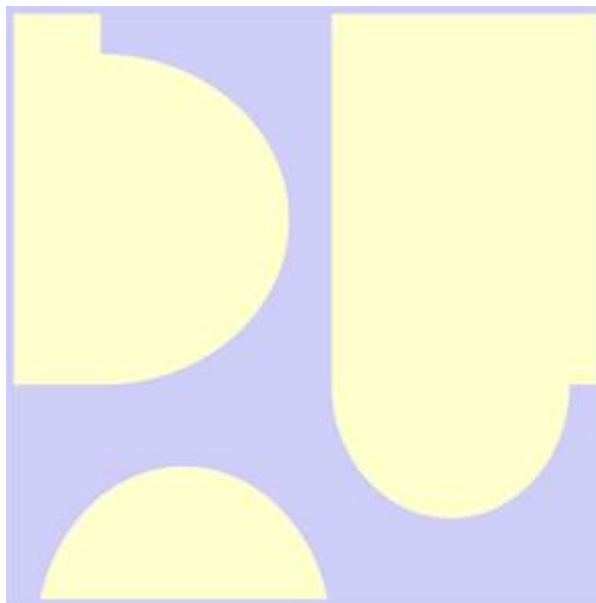
#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :



**TABEL 2.1**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang s.d triwulan II tahun 2023



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

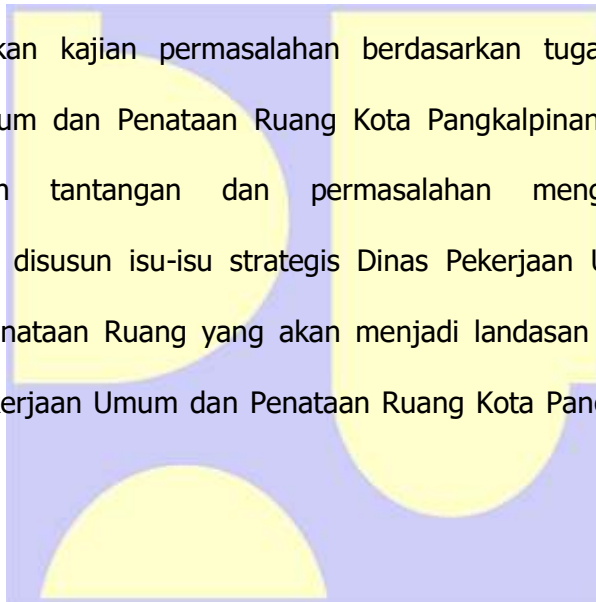
Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk Menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sesuai dengan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi	Kapasitas Air Baku	Jumlah Volume (Liter/Detik)	<b>320 LITER/DETIK</b>	Dinas PUPR	Dinas PUPR Ruang Kota Pangkalpinang
2	Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Saluran Drainase dan Gorong-gorong terbangun}}{\text{Target Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong}} \times 100 \%$	<b>100 %</b>	Dinas PUPR	Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
3	Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik	Sistem Pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Unit Sistem Pengolahan Air Limbah	<b>12 unit</b>	Dinas PUPR	Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
4	Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Permohonan Advis Planning yang disetujui}}{\text{Jumlah Dokumen Advis Planning yang diajukan}} \times 100 \%$	<b>100 %</b>	Dinas PUPR	Dinas PUPR Kota Pangkalpinang

### 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra sudah cukup baik dilihat dari persentase capaian kegiatan karena sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik, namun apabila dibandingkan dari kesesuaian antara IKU kota, dokumen RENSTRA, IKU, Perkin dan RKT maka tidak dapat dikatakan sesuai. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu RPJMD Kota Pangkalpinang disusun isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dua tahun mendatang.



## 2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

**TABEL 2.3**  
**REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023**  
**KOTA PANGKALPINANG**

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03			URUS	AN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								76.330.528.485	106,017,170,629		0		
1	03	01		PROG	RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.585.657.512	8.489.811.024		0		
1	03	01	2,02	Admi	nistrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.751.015.312	5.930.711.592		0		

1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	57 Orang/ bulan	57 Orang/ bulan	1 Laporan	1 Laporan	5.751.015.312	5.930.711.592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>0</b>	<b>135.100.000</b>			<b>0</b>	
1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	172 Paket	1 Laporan	0				135.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>	<b>Admi</b>	<b>nistrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>834.547.000</b>	<b>1.352.147.000</b>			<b>0</b>	
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	6 Laporan	6 Laporan	5.300.000	5.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	6 Laporan	6 Laporan	85.700.000	592.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0

1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	62 Paket	62 Paket	6 Laporan	6 Laporan	126.097.000	137.197.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	6 Laporan	6 Laporan	37.450.000	37.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	500.000.000	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	03	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	80.000.000	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
1	03	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi	100 %	0

**RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN 2023**

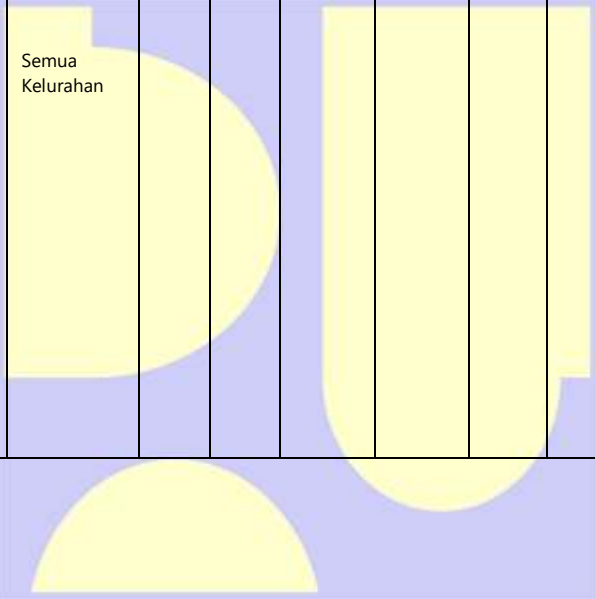


					baik			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										baik			
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>589.138.400</b>	<b>645.895.632</b>			<b>0</b>
1	03	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	216.000.000	241.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	0
1	03	01	02.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	0
1	03	01	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	323.138.400	329.895.632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	0
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>410.956.800</b>	<b>425.956.800</b>			<b>0</b>

1	03	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	73.176.800	73.176.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	03	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	2 Laporan	2 Laporan	337.780.000	352.780.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	03	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>											6.812.474.070	6.561.600.238				0
1	03	02	02.01		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											6.812.474.070	6.561.600.238				0

1	03	02	2,0 1	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 0 %	0 % 0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	701.14 0.000	701.140.0 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0 % 0 %	0
---	----	----	----------	----	--	--	--	---	--	---	---	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------------------------------	--	--	------------	---

1	03	02	2,0 1	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 0 %	0 % 0 %	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	516.11 1.070	556.111.0 70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 % 0 %	0
1	03	02	2,0 1	11	Pembangunan Pintu Air/Bendungan Pengendali Banjir	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang	Jumlah Pintu Air/Bendungan Pengendali Banjir yang Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	0 % 0 %	0 % 0 %	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir	0 % 0 %	0

	<p>terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab</p>		<p>pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>			<p>yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab</p>
--	--	--	--	---	--	---

1	03	02	2,01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 0 %	0 % 0 %	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	2.500.000.000	2.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 % 0 %	0
1	03	02	2,01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)		0 % 0 %	0 % 0 %	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	3.095.223.000	2.804.349.168	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	0 % 0 %	0

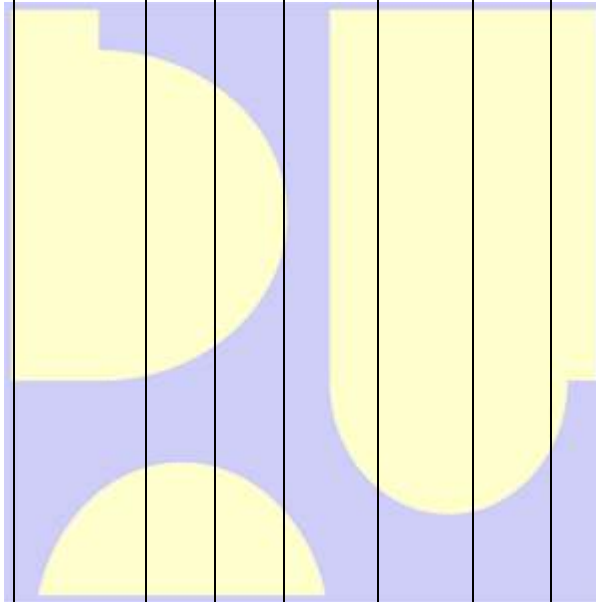
**RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN 2023**

				dalam 1 (Satu) Daerah																				
		kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab		Kabupaten/Kota																				pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab
<b>1 03 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>										<b>102.589.000</b>	<b>522.589.000</b>			<b>0</b>									
<b>1 03 03 2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>102.589.000</b>	<b>522.589.000</b>			<b>0</b>									

1	03	03	2,0 1	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b)) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a)) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Jumlah Laporan Pengelolan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	116 liter/de tik 98,5 % 98,5 % 70,4 3 %	240 Liter/D etik	240 Liter/D etik	1 Laporan	102,5 89,0	00 522,58 9,0	00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b)) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a)) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	116 liter/de tik 98,5 % 98,5 % 70,43 %	0
---	----	----	----------	----	--	---	--	--	---	------------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	----	--	---	---	---



Proporsi  
populasi  
yang  
memiliki  
akses  
layanan  
sumber  
air minum  
aman dan  
berkelanj  
utan



terh  
Proporsi  
populasi  
yang  
memiliki  
akses  
layanan  
sumber  
air minum  
aman dan  
berkelanj  
utan

1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>										936.3 58.67 3	1.056.85 8.673					0		
1	03	05	02.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											936.3 58.67 3	1.056.85 8.673						0
1	03	05	02.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).(6.2.1(c))	Kapasitas IPLT Terbangun	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkalpinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 M <sup>3</sup> /Hari	0 M <sup>3</sup> /Hari	1 Laporan	1 Laporan	936.358.673	1.056.858.673	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1(c))	100 %			
1	03	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>										7.607.831.930	17.001.535.930					0		
1	03	06	02.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										7.607.831.930	17.001.535.930					0		

1	03	06	02.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	3130 M	3130 M	3 Laporan	3 Laporan	4.981.982.000	13.306.664.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0 %	0
1	03	06	02.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	725 M	725 M	3 Laporan	3 Laporan	2.092.243.930	2.773.891.930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0 %	0
1	03	06	02.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	11 Unit	11 Unit	3 Laporan	3 Laporan	533.606.000	920.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0 %	0

																				Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																											
1	03	07			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>																		1.572.498.288	5.532.508.288																			0				
1	03	07	02.01		<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>																		1.572.498.288	5.532.508.288																						0	
1	03	07	02.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Persentase kawasan pemukiman	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Infrastruktur pada	Kota Pangkal Pinang, Semua	60%	60%	32 Sistem Jaringan	32 Sistem Jaringan	1 Laporan	1 Laporan	1.572.498.288	5.532.508.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kawasan pemukiman	60%	0																									
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>																		36.583.746.922	40.666.306.922																						0	
1	03	08	02.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>																		83,746,922,40,6	66.306.922																							0
1	03	08	02.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0%	500 Dokumen	500 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	409.890.288	481.490.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	0%	0																									

					serta Implementasi SIMBG		Laik Fungsi Bangunan Gedung															
1	03	08	02.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	36.173.856.634	40.184.816.634	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	0 %	0	
1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>											14.521.384.890	25.041.703.354					0
1	03	10	02	01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>											14.521.384.890	25.041.703.354					0

1	03	10	02.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen survey yang disusun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0
1	03	10	02.01	05	Pembangunan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	2.92 KM	2.92 KM	7 Laporan	7 Laporan	3.756.660.000	6.441.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0
1	03	10	02.01	08	Rekonstruksi Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang di rekonstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	6.14 KM	6.14 KM	7 Laporan	7 Laporan	3.847.079.000	9.093.513.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0
1	03	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	1.38 KM	1.38 KM	7 Laporan	7 Laporan	1.338.630.000	3.908.920.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0

1	03	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	2.92 KM	2.92 KM	7 Laporan	7 Laporan	2.073.881.890	2.092.896.354	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0
1	03	10	02.01	12	Pembangunan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jembatan yang Dibangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	15 M	15 M	7 Laporan	7 Laporan	3.403.599.000	3.403.599.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0
1	03	10	02.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan teknis yang disusun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	101.535.000	101.535.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>11</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>											<b>0</b>	<b>86.270.000</b>				<b>0</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>11</b>	<b>02.01</b>		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>											<b>0</b>	<b>86.270.000</b>				<b>0</b>
1	03	11	2.0106		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi yang Tersertifikasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	g 1 Laporan		0			86.270.000		PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10 %	0
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>											<b>607.987.200</b>	<b>1.057.987.200</b>				<b>0</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>318.990.400</b>	<b>749.990.400</b>				<b>0</b>

1	03	12	2.0 2 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah Dokumen tersusun -Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Persentase Terpenuhi nya peran tata ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 aplikasi 5 dokumen 400 orang 100 %	1 aplikasi 5 dokumen 400 orang 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	318.990.400	749.990.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah Dokumen tersusun -Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Persentase Terpenuhi nya peran tata ruang dan	1 aplikasi 5 dokumen 400 orang 100 %	0	
1	03	12	02.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>												149.000.000	168.000.000				0
1	03	12	2.0 3 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhi nya peran tata ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 aplikasi 5 dokumen 400 orang 100 %	1 aplikasi 5 dokumen 400 orang 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	149.000.000	168.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhi nya peran tata ruang dan pertanahan	1 aplikasi 5 dokumen 400 orang 100 %	0	
1	03	12	02.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>												139.968.000	139.996.800				0



1	03	12	2.0404	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 aplikasi 5 dokumen	1 aplikasi 5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	139.996.800	139.996.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100%	0			
2		URUS		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														8.339.968.000	17.210.856.800				0
2	10	02		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI														57.750.000	47.800.000				0
2	10	02	02.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														57.750.000	47.800.000				0
2	10	02	2.0101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase izin lokasi yang sesuai dengan RTRW	jumlah perizinan yang diawasi	Jumlah Laporan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 dokumen	8 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	57,750,0	47,800,0	00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase izin lokasi yang sesuai dengan RTRW	100 persen	0			
2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														439.895.000	499.905.000				0
2	10	04	02.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota														439.895.000	499.905.000				0

2	10	04	2,0 1 01		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	330.905.000	390.905.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100 %	0
2	10	04	2,0 1	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Berita Acara	3 Berita Acara	2 Laporan	2 Laporan	108.990.000	109.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100 %	0
2	10	05			<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>											6.638.050.000	15.419.788.800				0
2	10	05	2,0 1		<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>											6.638.050.000	15.419.788.800				0
2	10	05	2,0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	6.638.050.000	15.419.788.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	0



2	10	06	2,0 1	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	51.990 .000	42.000.00 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah	100 % 100 %	0
2	10	06	2,0 1	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	51.990 .000	52.000.00 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 % 100 %	0

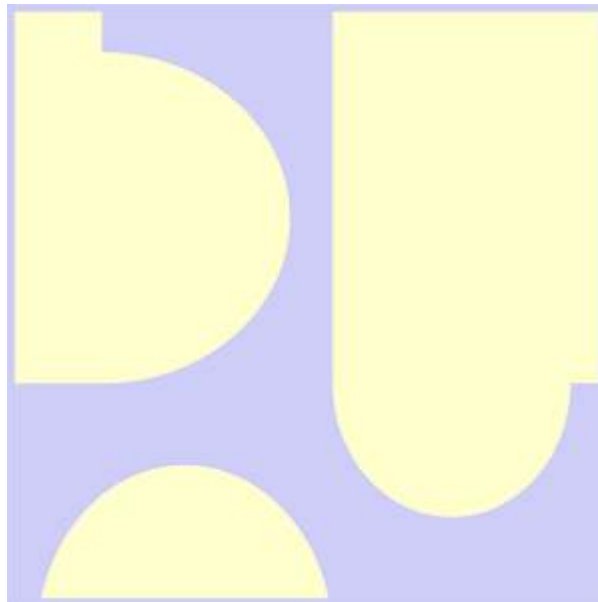
2	10	06	2,0 1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Tanah Redistribusi dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	51.990.000	52.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan	100 % 100 %	0		
2	10	08			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>													488.664.000	488.664.000				0
2	10	08	02.02		<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>													488.664.000	488.664.000				0
2	10	08	2.02 01		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota yang Diinventarisasi.	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	293.755.000	293.755.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	100 %	0		

2	10	08	2.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	194.909.000	194.909.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	100%	0		
2	10	09		<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>												195.500.000	222.750.000					0
2	10	09	02.01	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>												195.500.000	222.750.000					0
2	10	09	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terdapatnya pengelola izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	132.750.000	132.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terdapatnya pengelola izin membuka tanah	100%	0		
2	10	09	2.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terdapatnya pengelola izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	62.750.000	90.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terdapatnya pengelola izin membuka tanah	100%	0		
2	10	10		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>												192.490.000	214.300.000					0
2	10	10	02.01	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>												192.490.000	214.300.000					0

2	10	10	2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	111.00 0.000	111.000.0 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %	0	
2	10	10	2.0 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	81.490 .000	103.300.0 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %	0	
<b>TOTAL</b>														<b>84.67 0.496. 485</b>	<b>123,228, 027,42 9</b>						<b>0</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang melaksanakan kegiatan teknis yang sering langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horizontal, sehingga dapat mengakomodir usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Tujuan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran dari pernyataan misi, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah: "TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
2. domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
6. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua";
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian sasaran ke-4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yang ditetapkan dalam salah satu tujuan RPJMD kota pangkalpinang yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

a. Tujuan RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal

b. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi
2. Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong
3. Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik
4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berikut adalah indikator kinerja dan target pada tahun 2023 :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	<b>Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal</b>	<b>indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur daerah</b>	<b>indeks</b>	
1.	Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi	• Kapasitas Air Baku	liter / detik	320
2.	Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong	• Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	%	100
3.	Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik	• Sistem Pengelolaan air limbah domestik	unit	12
4.	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	• Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	100

### 3.3 Program dan Kegiatan

Bersasarkan hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Didalam RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2023 program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang akan melaksanakan 10 program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 7 Program pada urusan Pertanahan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>1 03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>1 03 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1 03 01 2,02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1 03 01 2,02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<b>1 03 01 2,05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1 03 01 2,05	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
<b>1 03 01 2,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1 03 01 2,06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 03 01 2,06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 03 01 2,06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 03 01 2,06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1 03 01 2,06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1 03 01 2,06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<b>1 03 01 02.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
1 03 01 02.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>1 03 01 02.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1 03 01 02.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 03 01 02.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 03 01 02.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>1 03 01 02.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1 03 01 02.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1	03	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>02.01</b>		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	02	2,01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1	03	02	2,01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	02	2,01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	2,01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	2,01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	03	2,01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>05</b>	<b>02.01</b>		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	05	02.01	15	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>02.01</b>		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	06	02.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	02.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
1	03	06	02.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>02.01</b>		<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	07	02.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>	<b>02.01</b>		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 36,5</b>
1	03	08	02.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1	03	08	02.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
1	03	10	02	01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>
1	03	10	02.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1	03	10	02.01	05	Pembangunan Jalan
1	03	10	02.01	08	Rekonstruksi Jalan
1	03	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan
1	03	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	03	10	02.01	12	Pembangunan Jembatan
1	03	10	02.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1	03	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>
1	03	11	02.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>
1	03	11	2.01		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
			06		
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>
1	03	12	2,02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
			02		
1	03	12	02.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan
			01		Pembangunan Daerah
1	03	12	02.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	12	2.04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
			04		
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
2	10				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>
2	10	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>
2	10	02	02.01		<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	10	02	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman
			01		Modal dan Kemudahan Berusaha
2	10	04			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
2	10	04	02.01		<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	10	04	2.01		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1
			01		(satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	04	2,01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	05			<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>
2	10	05	2,01		<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	10	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2	10	06			<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>
2	10	06	2,01		<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	10	06	2,01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
2	10	06	2,01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
2	10	06	2,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2	10	06	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2	10	08			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>
2	10	08	02.02		<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	09			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>
2	10	09	02.01		<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>
2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>
2	10	10	02.01		<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

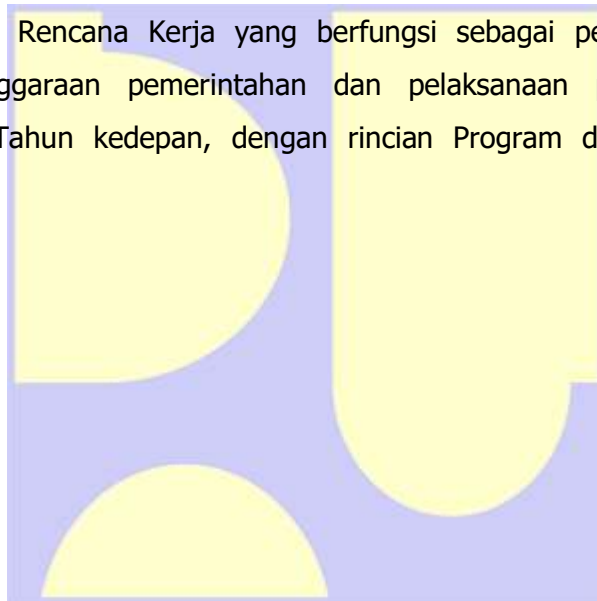


## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan OPD**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 mendatang akan melaksanakan 10 program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 7 Program pada urusan Pertanahan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 52 (lima puluh dua ) Sub Kegiatan. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1(satu) Tahun kedepan, dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :



**TABEL 4.1**

**Rumusan Rencana dan Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kota Pangkalpinang Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolak Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
1	03			URUS	<b>AN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								76.33	106,017,		0					
												0.528.	170,629		485						
1	03	01		PROG	<b>RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								7.585.	8.489.81		0					
												657.5	1.024		12						
1	03	01	2,02	Admi	<b>nistrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								5.751.	5.930.71		0					
												015.3	1.592		12						
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	5.751.015.312	5.930.711.592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	0
1	03	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								0	135.100.000		0					

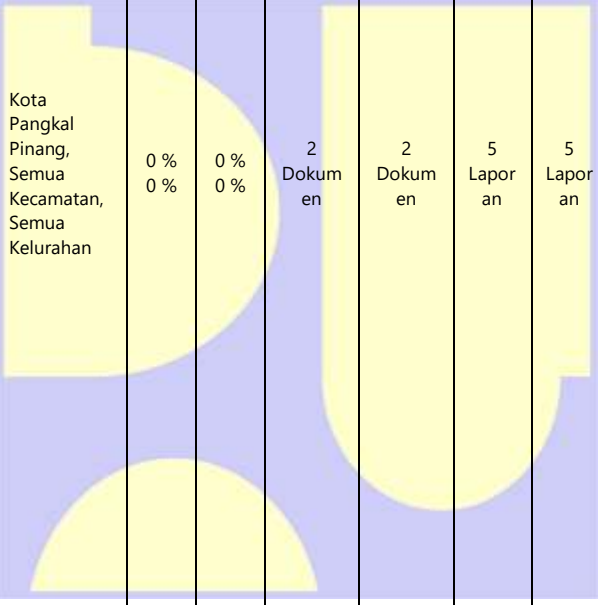
1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	172 Pak	et 1 Laporan	0	135.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0			
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>	<b>Admi</b>	<b>nistrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>834.547.000</b>	<b>1.352.147.000</b>		<b>0</b>				
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	6 Laporan	6 Laporan	5.300.000	5.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	6 Laporan	6 Laporan	85.700.000	592.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	62 Paket	62 Paket	6 Laporan	6 Laporan	126.097.000	137.197.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0

1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	5 Paket	5 Paket	6 Laporan	6 Laporan	37.450.000	37.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	0
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	500.000.000	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	0
1	03	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	80.000.000	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	0
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
1	03	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Unit	1 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	0
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02.</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>589.1</b>	<b>645.895.</b>				<b>0</b>

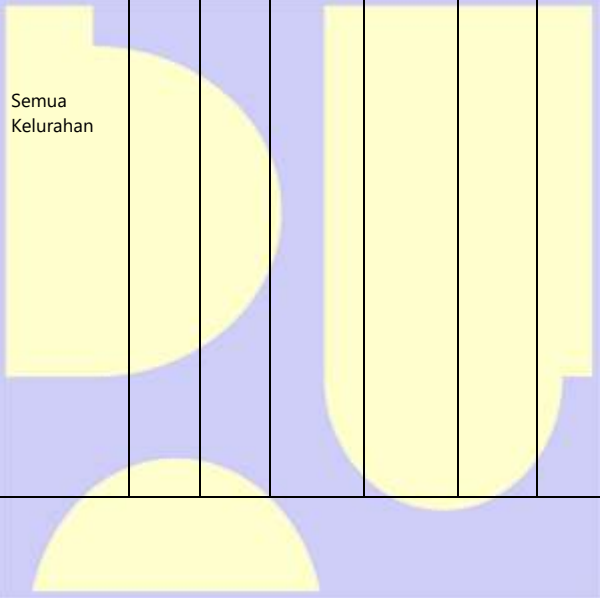
08					38.40	632																
					0																	
1	03	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	216.000.000	241.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0	
1	03	01	02.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0	
1	03	01	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	323.138.400	329.895.632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>410.956.800</b>	<b>425.956.800</b>					<b>0</b>
1	03	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	73.176.800	73.176.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0	

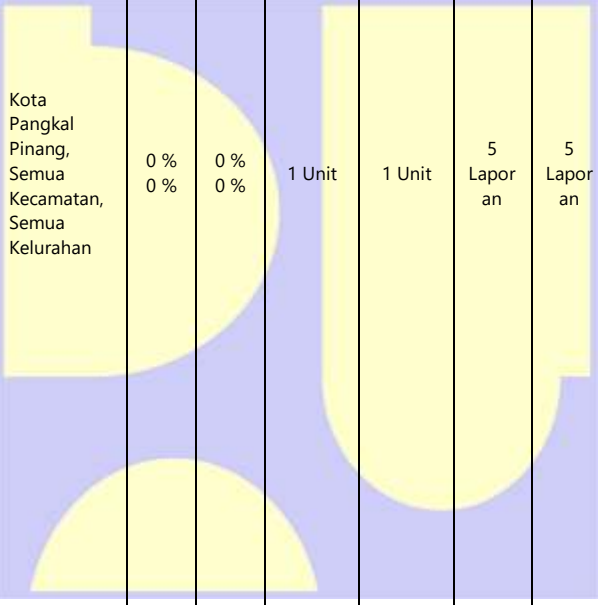
					Kendaraan Dinas Jabatan		Pajaknya	Daerah													
1	03	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	2 Laporan	2 Laporan	337.780.000	352.780.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>											<b>6.812.474.070</b>	<b>6.561.600.238</b>			<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>02.01</b>		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>6.812.474.070</b>	<b>6.561.600.238</b>			<b>0</b>	

1	03	02	2,01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 0 %	0 % 0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	701.140.000	701.140.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 % 0 %	0
---	----	----	------	----	--	---	--	---	---	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	------------------------------	---	------------	---

1	03	02	2,01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Laporan Pengendalian SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 0 %	0 % 0 %	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	516.11 1.070	556.111.0 70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 % 0 %	0
1	03	02	2,01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendungan Pengendali Banjir	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang	Jumlah Pintu Air/Bendungan Pengendali Banjir yang Dibangun	Jumlah Laporan Pengendalian SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	0 % 0 %	0 % 0 %	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir	0 % 0 %	0	



	<p>terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab</p>		<p>pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	 <p>Semua Kelurahan</p>				<p>yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

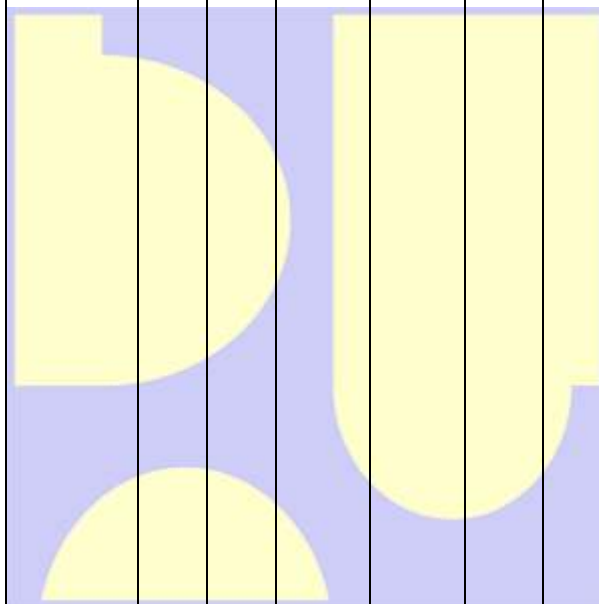
1	03	02	2,01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 % 0 %	0 % 0 %	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 % 0 %	0
1	03	02	2,01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada		0 % 0 %	0 % 0 %	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	3.095.223,000	2.804.349,168	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	0 % 0 %	0



1	03	03	2,0 1	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b)) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a)) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Jumlah Laporan Pengelolan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	116 liter/detik 98,5 % 98,5 % 70,43 %	240 Liter/Detik	240 Liter/Detik	1 Laporan	102,589,0	00 522,589,0	00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b)) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a)) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	116 liter/detik 98,5 % 98,5 % 70,43 %	0
---	----	----	----------	----	--	---	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------------	----	--	---	--	---

perpipaan terlindungi terhadap Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan

perpipaan terlindungi



																	terh Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanj utan				
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>										<b>936.3 58.67 3</b>	<b>1.056.85 8.673</b>				<b>0</b>	
1	03	05	02. 01		<b>Pengelola an dan Pengemb angan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate n/Kota</b>																<b>0</b>
1	03	05	02. 01	15	Pembang unan/Pen yediaan Sarana dan Prasarana IPLT	JUmlah Desa/Kelura han yang melaksanak an Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).(6.2. 1(c))	Kapasitas IPLT Terbang un	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengemban gan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pan gkal Pina ng, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kelu raha n	100 %	100 %	0 M <sup>3</sup> /Hari	0 M <sup>3</sup> /H ari	1 Lapor an	1 Lapor an	936.358.6 73	1.056.8 58.673	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Dana Transf er Khusu s- Dana Alokasi Khusu s Fisik	JUml ah Desa /Kelu rah an yang mela ksana kan Sanita si Total Berb asis Masy araka t (STB	100 %	

																				M). (6.2.1 (c))								
1	03	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>												7.607. 831.9 30	17.001.5 35.930								0		
1	03	06	02. 01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												7.607. 831.9 30	17.001.5 35.930										0
1	03	06	02. 01	05	Pembangu nan Sistem Drainase Perkotaan	Tingkat Kemantap an Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Laporan Pengelol aan dan Pengem bangan Sistem Drainase yang Terhubu ng Langsun g dengan Sungai dalam Daerah Kabupat en/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	3130 M	3130 M	3 Lapor an	3 Lapor an	4.981. 982.00 0	13.306.66 4.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Tingkat Kemantap an Sistem Drainase	0 %	0							

1	03	06	02.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tingkat Kematapan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	725 M	725 M	3 Laporan	3 Laporan	2.092.243.930	2.773.891.930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kematapan Sistem Drainase	0 %	0
1	03	06	02.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Tingkat Kematapan Sistem Drainase	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	11 Unit	11 Unit	3 Laporan	3 Laporan	533.606.000	920.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kematapan Sistem Drainase	0 %	0
1	03	07			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>											1.572.498.288	5.532.508.288				0
1	03	07	02.01		<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>											1.572.498.288	5.532.508.288				0



1	03	07	02.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Persentase kawasan pemukiman	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Infrastruktur pada	Kota Pangkal Pinang, Semua	60 %	60 %	32 Sistem Jaringan	32 Sistem Jaringan	1 Laporan	1 Laporan	1.572.498.288	5.532.508.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kawasan pemukiman	60 %	0
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>											<b>36.583.746.922</b>	<b>40.666.306.922</b>				<b>0</b>
1	03	08	02.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>											<b>83,746,922</b>	<b>66.306.922</b>				<b>0</b>
1	03	08	02.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	500 Dokumen	500 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	409.890.288	481.490.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	0 %	0

1	03	08	02.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	36.173.856.634	40.184.816.634	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	0 %	0		
1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>								<b>14.521.384.890</b>	<b>25.041.703.354</b>									<b>0</b>
1	03	10	02	01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>								<b>14.521.384.890</b>	<b>25.041.703.354</b>									<b>0</b>
1	03	10	02.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tingkat Kemandapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen survey yang disusun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,500 %	95,500 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemandapan Jalan Kabupaten/Kota	95,500 %	0		
1	03	10	02.01	05	Pembangunan Jalan	Tingkat Kemandapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,500 %	95,500 %	2,92 KM	2,92 KM	7 Laporan	7 Laporan	3.756.660.000	6.441.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemandapan Jalan Kabupaten/Kota	95,500 %	0		

1	03	10	02.01	08	Rekonstruksi Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang di rekonstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	6.14 KM	6.14 KM	7 Laporan	7 Laporan	3.847.079.000	9.093.513.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0
1	03	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	1.38 KM	1.38 KM	7 Laporan	7 Laporan	1.338.630.000	3.908.920.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0
1	03	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	2.92 KM	2.92 KM	7 Laporan	7 Laporan	2.073.881.890	2.092.896.354	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0
1	03	10	02.01	12	Pembangunan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jembatan yang Dibangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.500 %	95.500 %	15 M	15 M	7 Laporan	7 Laporan	3.403.599.000	3.403.599.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95.500 %	0

1	03	10	02.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat Kematapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan teknis yang disusun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										101.535.000	101.535.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Tingkat Kematapan Jalan Kabupaten/Kota					95,50 %	0					
1	03	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>												0	86.270.000											0			
1	03	11	02.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>												0	86.270.000														0
1	03	11	2.01.06		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi yang Tersertifikasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Kelurahan	10 %	40	g 1 Laporan						86.270.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					10 %	0					
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>												607.987.200	1.057.987.200												0		
1	03	12	2.02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>												318.990.400	749.990.400													0	

1	03	12	2.0 2 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah Dokumen yang tersusun -Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Persentase Terpenuhi nya peran tata ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Kelurahan	1 aplikasi 5 dokumen	1 aplikasi 5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	318.99 0.400	749.990.4 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah Dokumen yang tersusun -Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Persentase Terpenuhi nya peran tata ruang dan	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	0	
1	03	12	02. 03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>												149.0 00.00 0	168.000. 000				0
1	03	12	2.0 3 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhi nya peran tata ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Kelurahan	1 aplikasi 5 dokumen	1 aplikasi 5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	149.00 0.000	168.000.0 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhi nya peran tata ruang dan pertanahan	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	0	

1	03	12	02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										139.996.800	139.996.800					0	
1	03	12	2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 aplikasi 5 dokumen 400 orang 100%	1 aplikasi 5 dokumen 400 orang 100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	139.996.800	139.996.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	1 aplikasi 5 dokumen 400 orang 100%	0	
2	URUS			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										8.339.968.000	17.210.856.800						0
2	10	02		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI										57.750.000	47.800.000						0
2	10	02	02.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										57.750.000	47.800.000						0
2	10	02	2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase izin lokasi yang sesuai dengan RTRW	jumlah perizinan yang diawasi	Jumlah Laporan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 dokumen	8 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	57,750,0	47,800,0	00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase izin lokasi yang sesuai dengan RTRW	100 persen	0	
2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN										439.895.000	499.905.000						0



2	10	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	6.638.050.000	15.419.788.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	0
2	10	06			<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>											327.619.000	317.649.000			0	
2	10	06	2,01		<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											327.619.000	317.649.000			0	
2	10	06	2,01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100% 100%	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	171.649.000	171.649.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta	100% 100%	0



						ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota												ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee			
2	10	06	2,01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	51.990.000	42.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah	100 %	100 %	0

2	10	06	2,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	51.990.000	52.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	100 %	0
---	----	----	------	----	--	--	--	--	---	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------------------------	--	-------	-------	---

2	10	06	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	51.990.000	52.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan	100 %	100 %	0		
2	10	08			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>														488.664.000	488.664.000					0
2	10	08	02.02		<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>														488.664.000	488.664.000					0
2	10	08	2.01		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota yang Diinventarisasi.	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	293.755.000	293.755.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	100 %		0		

2	10	08	2.0 2 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	194.909.000	194.909.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	100 %	0	
2	10	09		<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>												195.500.000	222.750.000				0
2	10	09	02.01	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>												195.500.000	222.750.000				0
2	10	09	2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terdapatnya pengelola izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	132.750.000	132.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terdapatnya pengelola izin membuka tanah	100 %	0	
2	10	09	2.0 1 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terdapatnya pengelola izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	62.750.000	90.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terdapatnya pengelola izin membuka tanah	100 %	0	
2	10	10		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>												192.490.000	214.300.000				0
2	10	10	02.01	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>												192.490.000	214.300.000				0

2	10	10	2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	111.00 0.000	111.000.0 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %	0
2	10	10	2.0 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	81.490 .000	103.300.0 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %	0
<b>TOTAL</b>														<b>84.67 0.496. 485</b>	<b>123,228, 027,42 9</b>					<b>0</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung indikator setingkat outcome masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai targetnya untuk pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengembangan sumber daya pegawai dan sumber daya masyarakat. dimana kualitas dan kuantitas pegawai masih belum memadai. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan sampai saat ini adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan belum jelas status dan legitimasinya sehingganya dalam pelaksanaan tugas sering terjadi tumpang tindih dan keterbatasan sarana penunjang kegiatan kantor dan pemerintahan yang belum memadai sehingga berpengaruh kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu penataan sistem informasi kependudukan di kecamatan yang lebih maju dan tersistematis dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga sistem pelayanan yang diberikan pun lebih cepat dan efektif serta tersedianya data yang lebih akurat dan sistematis.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi, sebagian pelimpahan yang diwenangkan serta tugas-tugas lain dari pemerintah kota merupakan embrio kecamatan akan menjadi pusat pelayanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana termasuk penambahan dana yang terpisah dari anggaran rutin kecamatan dikarenakan saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah melainkan tempat wilayah kerja bagi fungsi-fungsi lain yang melekat di satuan kerja, dengan demikian pelimpahan kewenangan sepenuhnya kepada kecamatan

sangat diperlukan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas ke depan untuk dapat mencapai sasaran tujuan, misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diharapkan juga kepada semua unit organisasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya agar dapat terumuskan dengan baik di dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018-2023. sehingga tahun berikutnya target dari rencana kerja dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran.

